

**DESENTRALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN LAYANAN
PUBLIK LOKAL**

Studi Kasus Infrastruktur Jalan di Município Ermera

Tesis

ADELAIDE DE VASCONCELOS

2421618001



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

**DESENTRALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK LOKAL:
KASUS INFRASTRUKTUR JALAN DI MUNICIPIO ERMERA,
TIMOR-LESTE**

Oleh: Adelaide de Vasconcelos (2421618001)

(Dibawah bimbingan : Prof. Dr. Erwin, M.Si dan Dr. Widya Fitriana, Sp.M.Si)

ABSTRAK

Timor-Leste merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik demokratis yang menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai prioritas pembangunan nasional. Namun, efektivitas kebijakan sosial tersebut sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama melalui kebijakan desentralisasi. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting untuk memastikan layanan publik benar-benar menjawab kebutuhan lokal. Studi kasus di Municipio Ermera menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 telah menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan infrastruktur jalan, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kapasitas birokrasi lokal yang lemah, serta partisipasi warga yang cenderung formalistik. Kondisi ini berdampak pada kualitas pembangunan jalan yang belum berkelanjutan, sehingga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan distribusi hasil pertanian tetap terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan publik lokal, khususnya pada sektor infrastruktur jalan di wilayah pedesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui: analisis dokumen kebijakan, observasi lapangan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang menekankan partisipasi masyarakat dengan realitas implementasi di tingkat lokal. Partisipasi warga lebih banyak terjadi pada tahap pelaksanaan proyek, sementara keterlibatan dalam perencanaan dan pengawasan masih terbatas. Hal ini menyebabkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan infrastruktur jalan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan lokal, transparansi informasi, serta mekanisme partisipasi substantif. Saran yang diajukan adalah perlunya peningkatan kapasitas birokrasi daerah, diversifikasi sumber pendanaan untuk mengatasi keterbatasan anggaran, serta penguatan mekanisme partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. Dengan demikian, desentralisasi dapat lebih efektif dalam mewujudkan layanan publik lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci Desentralisasi; Partisipasi Masyarakat; Layanan Publik Lokal; Infrastruktur Jalan; Timor-Leste; Municipio Ermera

**DECENTRALIZATION AND CITIZEN PARTICIPATION IN THE
PROVISION OF LOCAL PUBLIC SERVICES: THE CASE OF ROAD
INFRASTRUCTURE IN MUNICÍPIO ERMERA,
TIMOR-LESTE**

By: Adelaide de Vascoonceos (2421618001)
(Supervised by: Prof. Dr. Erwin, M.Si, and Dr. Widya Fitriana, Sp.M.Si)

ABSTRACT

Timor-Leste, as a democratic republic, has prioritized education, health, and social protection since its independence. However, the effectiveness of these social policies depends largely on the ability of the state to bring public services closer to the people through decentralization. In this context, community participation becomes a crucial instrument to ensure that public services truly respond to local needs. The case study in Municipio Ermera reveals that although regulations such as Law No. 38/2004 emphasize community involvement in road infrastructure provision, implementation in practice continues to face challenges such as limited budgets, weak local bureaucratic capacity, and participation that remains largely formalistic. These constraints have resulted in poor road quality, which in turn hampers access to education, health services, and agricultural distribution. This study aims to analyze the relationship between decentralization and community participation in the provision of local public services, with a particular focus on road infrastructure in rural areas. A qualitative case study approach was employed, using policy document analysis, field observations, and interviews with local stakeholders. The findings highlight a gap between regulatory frameworks that mandate community participation and the reality of implementation at the local level. Community involvement in *suco meetings* tends to occur mainly during project execution, while participation in planning and monitoring remains limited. As a result, community aspirations are not fully reflected in infrastructure development. The study concludes that the success of decentralization depends not only on the transfer of administrative authority but also on strengthening local institutional capacity, ensuring transparency of information, and establishing substantive mechanisms for community participation. Recommendations include enhancing local bureaucratic capacity, diversifying funding sources to overcome budget limitations, and reinforcing community involvement from the planning stage through to monitoring. These measures are expected to make decentralization more effective in delivering inclusive and sustainable local public services that align with community needs.

Keywords: Decentralization; Community Participation; Local Public Services; Road Infrastructure; Timor-Leste; Municipio Ermera

